



PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN TERHADAP MANAJEMEN STANDARISASI DAN SUPERVISI BARANG KEBUTUHAN POKOK UNTUK PENINGKATAN HAK KONSUMEN DI KABUPATEN GARUT

Yusup Hermawan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut

hermawanyusup69@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri terhadap Manajemen Standarisasi dan Supervisi Barang Kebutuhan Pokok untuk Peningkatan Hak Konsumen di Kabupaten Garut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Standarisasi dan Supervisi Barang Kebutuhan Pokok untuk Peningkatan Hak Konsumen di Kabupaten Garut.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Manajemen, Distribusi, Supervisi, Konsumen

1. Pendahuluan

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.

Kebijakan umum tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Garut mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui kebijakan tersebut diharapkan permasalahan hak konsumen akan teratasi secara optimal, namun yang terjadi malah sebaliknya permasalahan sistem pendistribusian barang kebutuhan pokok di Kabupaten Garut masih belum lancar, hal ini ditunjukkan oleh fenomena disparitas harga antar wilayah yang masih relatif tinggi dan fluktuasi harga yang belum terkendali. Tingkat kebutuhan masyarakat akan barang kebutuhan pokok semakin meningkat di sebagian wilayah kecamatan rata-rata 30% per hari, sedangkan pasokan barang kebutuhan pokok ke setiap pasar kecamatan masih kurang dan sarana dan prasarana jalan yang hampir 60% kondisinya rusak menyebabkan distribusi hasil produksi tidak berjalan lancar. Permasalahan terakhir adalah masih lemahnya manajemen standarisasi dan supervisi barang yang diakibatkan kurangnya sosialisasi Implementasi Kebijakan perdagangan dalam negeri di Kabupaten Garut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri terhadap Manajemen Standarisasi dan Supervisi Barang Kebutuhan Pokok untuk Peningkatan Hak Konsumen di Kabupaten Garut.

2. Kajian Teori

2.1 Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2007 : 68) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur / mengatur proses implementasinya.

2.2 Manajemen Distribusi

Menurut Suradinata (dalam Iskandar, 2005: 251) bahwa secara umum manajemen dapat diartikan sebagai "Kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang se-efisien mungkin, sedangkan pemerintahan, mengacu kepada kegiatan-kegiatan lembaga publik dalam mencapai tujuan negara."

2.3 Supervisi

Kegiatan supervisi menurut Ryland (dalam Iskandar, 2005:259) didefinisikan sebagai hubungan antara supervisor dan pegawai, yang mana tanggungjawab supervisor adalah memberikan pengetahuan agar pegawai memahami tugas pekerjaannya dan mengawasi sampai seberapa jauh tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai yang telah dikerjakan, mengevaluasi sejauhmana pemahaman pegawai akan ruang lingkup tugas pekerjaannya dan tingkat penguasaan serta keterampilan kerja.

2.4 Hak Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan hak konsumen sebagai hak yang dimiliki setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi dengan teknik evaluatif dan desain penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Populasi penelitian adalah pimpinan dan pegawai pada Bidang Perdagangan Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut. Teknik pengambilan sampel dengan metode sensus dan teknik pengambilan data menggunakan angket dan wawancara.

4. Hasil dan Implikasi

Sebanyak 70 % responden menyatakan Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri di Kabupaten Garut telah dilakukan dengan baik. Walaupun demikian diperlukan perbaikan terutama dalam hal pelaksanaan pengendalian kegiatan oleh pimpinan yang dianggap masih lemah. Lemahnya pengendalian pimpinan dalam Implementasi Kebijakan tergambar dari persentase jawaban responden yang berada di bawah rata-rata keseluruhan pada variabel ini yakni 59%.

Pelaksanaan Manajemen Standarisasi Barang Kebutuhan Pokok memperlihatkan kondisi cukup baik dengan rata-rata jawaban responden sebesar 65 %. Pada variabel ini pelaksanaan yang belum maksimal adalah masih kurangnya koordinasi dalam membangun kemitraan antara Kepala UPTD, dinas terkait dan para pengusaha. Disamping itu lemahnya akuntabilitas keuangan di tingkat UPTD juga masih merupakan masalah yang masih harus di atasi.

Pelaksanaan Supervisi Barang Kebutuhan Pokok menunjukkan hal positif dimana rata-rata jawaban responden mencapai persentase baik yakni sebesar 79%. Persentase terendah jawaban responden pada variabel ini terlihat pada aspek mekanisme penyusunan laporan supervisi yaitu sebesar 75% yang berada di bawah rata-rata keseluruhan.

Kondisi Peningkatan Hak Konsumen menunjukkan persentase jawaban responden yang relatif baik yaitu sebesar 76 %. Aspek yang masih perlu perbaikan pada variabel ini adalah masih adanya diskriminasi perlindungan hukum terhadap konsumen yang ditunjukkan oleh angka persentase sebesar 66% jauh di bawah rata-rata jawaban responden secara keseluruhan.

5. Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis utama menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap manajemen standarisasi dan supervisi barang kebutuhan pokok untuk peningkatan hak konsumen di Kabupaten Garut. Signifikansi nilai hasil pengujian tersebut, didukung pula oleh besaran nilai koefisien jalur (P_{zy1y2x}) sebesar 0,591 dan *Koefisien Determinasi* sebesar $= 0.349$. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 34,90 %, sedangkan sisanya ($P_{YZ\epsilon}$)² yaitu sebesar 65,10 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel penelitian yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Manajemen Standarisasi Barang Kebutuhan Pokok dengan besar pengaruh yakni 28,6 %.

Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap supervisi barang kebutuhan pokok. Hal ini ditunjukkan oleh besar pengaruh yang hanya 0,5 %.

Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Peningkatan Hak Konsumen dengan besar pengaruhnya adalah 12,1 %.

Manajemen Standarisasi Barang Kebutuhan Pokok berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Hak Konsumen, dengan besar pengaruhnya yaitu 10,2 %.

Supervisi Barang Kebutuhan Pokok tidak berpengaruh secara signifikan Terhadap Peningkatan Hak Konsumen. Hal ini didukung oleh besaran pengaruhnya yang hanya sebesar 1,21 %.

Terdapat korelasi positif antara Manajemen Standarisasi Barang Kebutuhan Pokok dengan Supervisi Barang Kebutuhan Pokok, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,152. Namun setelah dilakukan pengujian ternyata korelasi 0,152 tersebut tidak signifikan.

6. Rekomendasi

Dari hasil penelitian maka penulis merekomendasikan bahwa kaitannya dengan manajemen standarisasi dan supervisi barang kebutuhan pokok untuk peningkatan hak konsumen di Kabupaten Garut, maka pimpinan harus dapat mensosialisasikan mengevaluasi dari kebijakan tersebut.

7. Ucapan Terima Kasih

Sebagai ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kepala Dinas dan seluruh staf Dinas perdagangan Kabupaten Garut yang sudah membantu dalam memberikan informasi dan data penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Iskandar, Jusman. 2005/a. *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
-----2005/c. *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi*, Program Pascasarjana, UNIGA.
-----2005/d. *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
-----2009 *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
Kristiadi. 2000. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian, Sondang P. 2007. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
Singarimbun dan Efendi. 2001. *Metode Penelitian administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
Sudjana. 2000. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
Supriatna, Cahya. 2000. *Akuntabilitas Pemerintah Dalam Administrasi Publik*. Bandung: Indra Prahasta.
Wahab, Abdul, Solichin. 2007. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
Yudhoyono, Bambang. 2008. *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dokumen-dokumen

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
4. Keputusan Bupati Garut Nomor 408 Tahun 2008 tentang tugas pokok fungsi dan tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Garut.